

**PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik berupa data panel terdiri dari *cross section* dan *time series* yaitu 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dari tahun 2017-2021. Pada penelitian ini digunakan uji regresi linear berganda diolah dengan alat *statistic* yaitu *software Eviews 9*. Adapun model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Dari hasil penelitian secara parsial bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Sedangkan upah minimum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Dilihat secara simultan pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Kalimantan Barat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 75,09% dan sisanya 24,91% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : pendidikan, upah minimum, jumlah penduduk, pengangguran.

**PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Oleh : Gusti Syafiq Darmawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tangjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Sumber daya manusia, yakni penduduk merupakan aspek utama yang berperan krusial dalam pembangunan ekonomi. Namun, keberhasilan dari suatu pembangunan tidak selalu bergantung pada besarnya jumlah penduduk dan justru besarnya jumlah penduduk dapat menjadi beban dalam keberlangsungan pembangunan. Kesenjangan yang terjadi antara besarnya jumlah penduduk terhadap kesempatan kerja yang tersedia dapat mengakibatkan muncul dan meningkatnya angka pengangguran pada sebagian penduduk usia produktif (Sulistiawati, 2012).

Masalah pengangguran termasuk masalah dalam lingkup sosial, seperti tindakan kejahatan/kriminalitas dan masalah ekonomi. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan pada tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Kemakmuran kehidupan masyarakat dalam suatu negara dapat dilihat dari tingkat penganggurannya, apabila angka pengangguran rendah maka menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tersebut makmur dan begitu pula sebaliknya. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya angka pengangguran, yaitu tingginya ketentuan kriteria yang ditetapkan oleh suatu perusahaan terhadap para tenaga kerja yang sedang dicari. Angka pengangguran

akan meningkat seiring dengan tingginya ketentuan kriteria yang diinginkan oleh suatu perusahaan dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Menurut (Suhaidi & Setyowati, 2022), pendidikan berkontribusi dalam mempengaruhi jumlah pengangguran. Kualitas tenaga kerja tercermin pada tingkat pendidikan dengan diukur lamanya pendidikan. Tingkat pendidikan semakin tinggi maka berdampak pada kemampuan seseorang untuk mendapatkan kesempatan dalam bekerja. Tingginya tingkat pendidikan seseorang menggambarkan kualitas kompetensi dan keahlian yang beragam sehingga dapat meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja serta dapat membantu menurunkan angka pengangguran.

Upah merupakan pembayaran yang diberikan pada pekerja oleh pemberi kerja setelah dilakukannya suatu pekerjaan atau jasa secara fisik maupun mental. Menurut (Sukirno, 2015), Upah minimum merupakan upah yang sangat menentukan kehidupan tenaga kerja. Sedangkan menurut (Purnami, 2015), Upah minimum merupakan sebuah standar minimum gaji yang diberikan oleh para pebisnis, yang mempunyai ekuitas, yang berperan dalam industri, yang memberi gaji dalam lingkup korporasinya. Maka dari itu, tenaga kerja memerlukan kemampuan, *skill*, ilmu dan pengalaman yang baik guna mendapatkan upah yang tinggi. Ketika tenaga kerja kurang memiliki *skill*, maka upah yang akan diterima juga rendah. Hal ini yang membuat kehidupan tenaga kerja tidak tercukupi dengan baik.

2. Permasalahan

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat yakni tingkat pengangguran yang tinggi dimana jumlah pengangguran pada tahun 2020 sebesar 5,81% dan meningkat di tahun 2021 menjadi 5,82%. Terdapat perbedaan antara besarnya angka pengangguran terhadap pendidikan, upah minimum, serta jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Masalah yang terjadi ketika kebanyakan lama sekolah dalam pendidikan formal di daerah sebagian masih rendah, upah minimum meningkat setiap tahunnya, jumlah penduduk semakin bertambah, sehingga menimbulkan persaingan antara tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan, namun dengan lapangan kerja yang kurang memadai dan tingkat

pendidikan para pencari kerja masih rendah. Sehingga, perusahaan hanya ingin memilih tenaga kerja yang menunjukkan *skill* atau keterampilan dan pendidikan yang tinggi dengan keterbatasan pada lapangan pekerjaan.

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linier berganda dalam menjalankan pengujian terhadap hipotesis penelitian.. Adapun Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda dengan metode yang terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM). Data yang digunakan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah menggunakan software Eviews 9.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel pendidikan positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, upah minimum positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Adapun secara simultan bahwa variabel pendidikan, upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 75,09%

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan pendidikan berpengaruh terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Ini disebabkan karena pendidikan merupakan investasi yang penting bagi individu maupun masyarakat, sehingga

membuka peluang mendapatkan profesi yang luas untuk orang-orang yang memiliki taraf pendidikan yang lebih tinggi. Namun, hal tersebut tidak disertai dengan ketersediaan peluang kerja. Kemudian, upah minimum dan jumlah penduduk yang tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Hal tersebut dikarenakan kenaikan pada upah minimum setiap tahunnya tidak begitu berdampak dalam permintaan pekerja dan jumlah penduduk yang didominasi usia produktif tidak akan mempengaruhi tingkat pengangguran.

Adapun rekomendasi atau saran untuk pemerintah yaitu Pemerintah daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat hendaknya harus melakukan pemerataan serta menyediakan fasilitas sarana prasarana yang baik di tiap daerah di Kalimantan Barat dalam upaya untuk menunjang proses pendidikan guna menghasilkan kualitas pada sumber daya manusia yang terbaik. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya dalam menentukan penetapan upah minimum dan mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan serta keperluan hidup bagi pekerja pun perlu dalam memperhitungkan dampak dari tingkat upah. Pemerintah daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat hendaknya membuat kebijakan yang dapat mendorong pemilik modal untuk membangun berbagai perusahaan baru sehingga berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan merata. Hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, apabila dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada perekonomian di Kalimantan Barat. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa menambah variabel bebas lain atau menerapkan model kajian yang tidak sama agar perolehan penelitian lebih sempurna